

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Ugm Press.
- Ismail, I., & Herlina, B. (2021). Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(2), 560–571.
- Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Deepublish.
- Semil, N. (2018). Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis Pada Sistem Pelayanan Publik Di Indonesia.
- Thoha, M. (2017). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana.

Jurnal *Online*

- Alhamid, T. (2019). Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif. <https://doi.org/10.31227/osf.io/s3kr6>
- Erna¹, Iwan Mamminanga², Andi Renilda Filyandini³. Pengaruh Good Governance Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 2, 129-127. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.63>
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 7(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>
- Febrianti, M. M., & Priyadi, M. P. (2022). Implementasi Good Governance Dan Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(8), 1–16.
- Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153–160. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 131–150. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921>
- Hidayat, E., Pramono, T., Fachruddin, I., & Prissando, F. A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(1), 29–40. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.139>
- Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021). Model Analisis Swot Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Online Single Submission (Oss) Pada Dpmptsp Provinsi Jawa Timur Swot Analysis Model Of Online Single Submission (Oss) Service Quality Improvement In Dpmptsp East Java.
- Jipsi-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Unikom, 6.
- Lenak, S. C. M., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Governance*, 1(1).

- Lusiana, N., & Najamudin, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal Of Public Administration*, 5(2), 304–316. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5040>
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 90–115. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5088>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-37. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nadine Harum, M. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pt. Satu Maju Hotelindo. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Nano, I. (2021). Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas). *Iain Purwokerto*. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/9439>
- Primanda, R. (2017). Efektivitas Program Sms Gateway Pada Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 5.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652–674. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patirol, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1), 4293–4302. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11695>
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip
- Sedarmayanti, S. G., Pradesa, H. A., Agnesia, T., & Sitorus, T. (2020). The Effect Of Good Governance, Leadership And Organizational Culture On Public Performance Accountability. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 9(1).
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Sulfiani, A. N. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas Iii Kota Palopo. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(1), 10–18. <http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.740>
- Syarif, I. (2020). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8, 911–924.
- Triyadi, A. (2023). Pelaksanaan Good Governance Dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. *Perpustakaan*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66323>

(<https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini->)

(Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

(Kominfo. (2018). Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Lebih-Mudah-Pemerintah-Meluncurkan-Sistem-Oss/0/Artikel_Gpr)

(<https://sistem.oss.go.id/>)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.